



Pengaruh Alokasi Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

The Influence of Education, Health and Social Expenditure Allocations on the Level of Human Development Index for Districts/Cities of Aceh Province

Zulfadli Siregar^{1*}, Erlina², Sirojuzilam³

^{1,3} Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatra Utara, Medan, Indonesia

² University Sains Malaysia, Malaysia

*E-mail: siregar.zulpadli@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel alokasi belanja pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS. Data yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja APBD sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial periode tahun 2021-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja Pendidikan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Aceh. Belanja Sosial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Aceh. Variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Sosial secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota Provinsi Aceh. Namun, hanya 4 persen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen di atas, sedangkan sisanya yaitu 96 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Belanja pendidikan, Belanja kesehatan, Belanja perlindungan social, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*

Abstract

This study aims to see the effect of expenditure allocation variables in the education, health and social protection sectors on the Human Development Index (IPM) in districts/cities in Aceh province. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis using SPSS. The data used is the Human Development Index (IPM) and APBD expenditures for the education, health and social protection sectors for the 2021-2022 period. The results of the study show that education spending has a negative but not significant effect on the district/city HDI of Aceh Province. Social Expenditures have a positive but not significant effect on the district/city HDI of Aceh Province. The variables of Education Expenditure, Health Expenditure and Social Expenditure simultaneously influence the Human Development Index (IPM) of the districts/cities of Aceh Province. However, only 4 percent of the Aceh Province District/City Human Development Index can be explained by the three independent variables above, while the remaining 96 percent is explained by other variables not included in this study.

Keywords: *Education spending, Health spending, Social protection spending, Human Development Index (HDI)*

Cara citasi : Siregar, Zulfadli., Erlina., Sirojuzilam. (2023). Pengaruh Alokasi Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 4 No 1 Maret 2023, 9-18.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi yang ada (Todaro dan Smith, 2011). Salah satu pembangunan ekonomi dengan memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

Pengukuran kualitas IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup, lalu pengetahuan yang diukur dengan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, selanjutnya indeks kelayakan hidup diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita (Rochmah dan Sukmana, 2019).

Pembangunan manusia bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya (Widodo dkk., 2011). Sekurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan (Widodo dkk., 2011). Adapun dimensi dasar dari IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (BPS, 2022).

Faktor utama dalam pembangunan manusia adalah kesehatan yang dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Di negara berkembang banyak kematian terjadi selama masa bayi dan kanak-kanak, maka rata-rata harapan hidupnya jauh lebih rendah daripada di negara maju. Selain kesehatan, aspek pendidikan juga salah satu komponen utama dalam pembangunan manusia. Aspek pendidikan dalam hal ini Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan berjenjang yang ditunjukkan dalam bentuk rata-rata lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Aspek penting lainnya dalam melihat pembangunan manusia adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu aspek lain yang menggambarkan kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak. Menurut BPS, standar hidup layak dapat dilihat menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan (daya beli masyarakat). Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan (BPS, 2022).

Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah daerah memiliki kewenangan berupa desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan target pembangunan tersebut, kemampuan pemerintah dinilai melalui kebijakan fiskal yaitu ketersediaan ruang dalam anggaran yang memungkinkan pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan pemerintah (CALK LKPP, 2010).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat kesenjangan pembangunan di 3 aspek pendidikan, kesehatan dan sosial di Provinsi Aceh. Tulisan ini pada dasarnya akan membahas tentang pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan dan sosial terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Jenis penelitian menurut tingkat ekplanasinya adalah kuantitatif/asosiatif/korelasional, yaitu analisis datanya menggunakan statistik inferensial, dengan tujuan mengetahui derajat hubungan dan bentuk pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih (Rusiadi, *dkk*, 2014).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa pengumpulan bahan-bahan dan data yang berhubungan dengan pokok bahasan yang peneliti kutip dari catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan). Data didapatkan dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh berupa data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2011 - 2021, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2011 - 2021,

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2011 – 2021 dan Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2011 – 2021.

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis regresi diperoleh dari *data series* APBD Belanja Per Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2011 – 2021 melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Dengan analisis ini pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent yang diteliti bisa diketahui. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis, adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1BP + b_2BK + b_3BS + e$$

Keterangan :

Y	= IPM (%)
BP	= Belanja Pendidikan (Rp. Jutaan)
BK	= Belanja Kesehatan (Rp. Jutaan)
BS	= Belanja Sosial (Rp. Jutaan)
a	= Konstanta
b _{1,2} ,	= Koefisien regresi
e	= error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diperoleh dari Kab/Kota di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 6.514 gampong atau desa. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah penduduk Provinsi Aceh 5.274.871 jiwa dengan Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 602.793 jiwa, sedang wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Sabang sebanyak 41.197 jiwa.

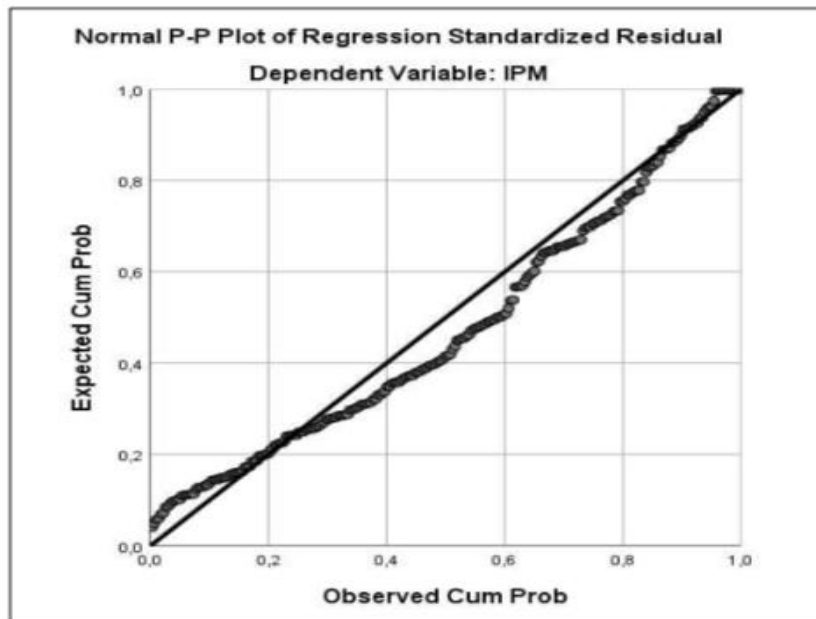
Data yang dikumpulkan berupa data series APBD Per fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2011 – 2021 melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Pendapatan Perkapita (ribu rupiah) Provinsi Aceh Tahun 2011-2022

Kab/kota	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Simeulue	5781	5854	5950	5956	6328	6542	6677	6824	7210	7085	7148
Aceh Singkil	7123	7165	7208	7221	7602	8068	8230	8506	8715	8707	8776
Aceh Selatan	6890	6913	6989	7003	7224	7397	7567	7891	8187	8089	8180
Aceh Tenggara	6731	6788	6989	6949	7001	7212	7359	7685	8067	8020	8030
Aceh Timur	6897	7178	7219	7288	7623	7825	7961	8252	8600	8489	8577
Aceh Tengah	9330	9365	9400	9435	9473	9920	10021	10394	107892	10673	10780
Aceh Barat	7632	7688	7744	7771	8135	8559	8989	9134	9692	9516	9593
Aceh Besar	8246	8344	8497	8622	8775	8788	8965	9192	9661	9641	9644
Pidie	9076	9121	9167	9182	9233	9273	9377	9492	9824	9816	9860
Bireuen	6822	6996	7232	7319	7622	7885	8237	8378	8889	8857	8867
Aceh Utara	6465	6562	9714	6838	7327	7520	7632	7919	8189	8122	8201
Aceh Barat Daya	6655	6828	6966	7059	7303	7567	7723	8093	8491	8316	8428
Gayo Lues	7635	7646	7709	7742	7780	8048	8322	8529	8845	8791	8856
Aceh Tamiang	7455	7478	7554	7569	7750	7766	7931	8032	8362	8327	8367
Nagan Raya	6834	6902	7019	7084	7141	7460	7732	7936	8348	8216	8292
Aceh Jaya	8596	8679	8691	8721	8749	8789	8322	9262	9682	9615	9666
Bener Meriah	9289	9580	9645	9721	9760	10140	1043	10626	11124	11098	11118

Sumber : BPS Provinsi Aceh 2022

Dari tabel data tersebut digunakan uji asumsi apakah model regresi pada penelitian ini dapat diuji atau tidak. Uji asumsi klasik terdiri dari empat yaitu normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Keempat uji tersebut tidak boleh ditemukan didalam model regresi yang akan digunakan dan data yang dihasilkan harus berdistribusi secara normal. Modal regresi dikatakan layak untuk diuji ketika ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi.



Gambar 1.1 Normal P-Plot Of regression Standardized Resudial

Dengan melihat tampilan grafik normal plot pada Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Terdistribusi normal artinya sebaran data pada kelompok data belanja pendidikan, kesehatan, sosial dan IPM periode tahun 2011 – 2021 berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Variabel belanja pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Habeban (2015) dengan judul analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara) Periode 2004-2013 bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM. Hasil ini menunjukkan semakin besar Belanja Pendidikan yang diperoleh maka akan semakin menurunkan laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian Imron dan Satria (2018) bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur 2011-2016.

Belanja Pendidikan yang diperoleh hanya sebagian saja yang digunakan untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru dan siswa

(hanya pembangunan sekolah secara fisik). Terlebih lagi jumlah penduduk yang juga terus bertambah tiap tahunnya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan pendidikan dalam jumlah yang besar. Selain itu karena jumlah partisipasi aktif masyarakat Provinsi Aceh dalam mengenyam pendidikan masih relatif rendah serta ditambah aksesibilitas sekolah yang masih rendah maka pengeluaran pendidikan masih belum efektif untuk meningkatkan IPM Provinsi Aceh dan cenderung memiliki hubungan yang negatif.

Peningkatan anggaran pendidikan sangat diperlukan dan menjadi pilihan, namun masih belum mampu meningkatkan IPM. Permasalahannya bukan bagaimana meningkatkan anggaran pendidikan dan semata tetapi bagaimana pemanfaatan dan pengalokasian anggaran ini digunakan dengan lebih baik dan tepat sasaran sehingga peningkatan nilai IPM itu sendiri dapat terpenuhi melalui sektor pendidikan.

Variabel Belanja Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian Imron dan Satria (2018) bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur 2011-2016.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Imron (2018) bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 - 2016. Selanjutnya pernyataan mengenai pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan akan berdampak positif terhadap IPM diafirmasi oleh penelitian Wijayanto, Khusaini dan Syafitri (2015) yang menyatakan bahwa angka harapan hidup yang semakin lama menunjukkan semakin baiknya derajat kesehatan individu. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perbaikan layanan kesehatan, baik dalam segi kuantitas dan kualitas.

BPS Provinsi Aceh (2021) menjelaskan angka harapan hidup masyarakat Provinsi Aceh naik hingga mencapai 69,96 tahun. Selain itu berimplikasi terhadap penurunan jumlah angka kematian bayi di Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh selama kurun waktu 2017 - 2020 masing-masing sebesar 10/1000 LH, 10/1000 LH, 9/1000 LH dan 7/1000 LH. Hal tersebut sesuai dengan penghitungan IPM oleh UNDP (1990) yang menyebutkan bahwa salah satu indeks komposit adalah angka harapan hidup. Sehingga apabila terjadi kenaikan angka harapan hidup secara otomatis akan meningkatkan IPM.

Variabel belanja sosial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Ikbal (2021) yang membuktikan bahwa Pengeluaran fungsi perlindungan sosial secara langsung berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gowa tahun 2015 - 2019. Nikmah (2020) juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dalam perspektif Islam di provinsi Jawa Tengah periode 2014-2018.

Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial di Kabupaten / Kota Provinsi Aceh memiliki pengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Aceh dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan program perlindungan sosial khususnya dalam mencapai target penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan yang dapat menunjang peningkatan nilai IPM. Hal ini dapat dilihat data BPS tahun 2022 bahwa provinsi Aceh termasuk dalam 5 Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan persentase 15.53% penduduk miskin setelah Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Selain itu tingkat pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten / Kota Provinsi Aceh menjadi salah satu pendorong belum optimalnya fungsi perlindungan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Aceh sebesar 6,30% pada Agustus 2021. Ini berarti ada sekitar 6 dari 100 angkatan kerja pemuda yang tidak terserap oleh pasar kerja. Oleh karenanya penting untuk mengoptimalkan program perlindungan sosial untuk menunjang nilai IPM.

Mengacu pada hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini, variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja sosial secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota Provinsi Aceh. Namun, hanya 4 persen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen di atas. sedangkan sisanya yaitu 96 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Variabel lain yang dapat diikutsertakan pada penelitian selanjutnya yaitu variabel kemiskinan. Sesuai dengan penelitian Muliza (2017) yang menyatakan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh, maka dengan menurunnya tingkat kemiskinan dapat meningkatkan

indeks pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi (2017) yang menyatakan bahwa penurunan kemiskinan akan menurunkan IPM di Provinsi Riau.

Selain variabel kemiskinan, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat dijadikan menjadi variabel independen untuk diikutsertakan pada penelitian selanjutnya. Menurut Muliza (2017), PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia yang berarti PDRB meningkat maka IPM juga akan meningkat di Provinsi Aceh.

Variabel pertumbuhan ekonomi juga dapat dijadikan salah satu variabel independen pada penelitian selanjutnya Menurut Ramadhan (2018), pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi maka terjaminlah peningkatan produktivitas yang secara langsung dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan hasil regresi ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan sosial di kabupaten/kota Provinsi Aceh secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten/kota provinsi Aceh masih lebih dominan mengalokasikan belanjanya pada jenis belanja yang secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Belanja fungsi pendidikan alangkah baiknya jika tidak hanya dioptimalkan dalam pembangunan fisik saja, namun juga kualitas dan mutu murid dan pendidik. Hal yang sama juga berlaku terhadap belanja perlindungan sosial, program dan kegiatan yang dibuat diharapkan dapat menysasar langsung penduduk miskin.

Selain itu, belanja kesehatan diharapkan tetap difokuskan untuk memperbaharui sistem pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit, menambah tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan fasilitas publik yang menunjang pelaynan kesehatan. Permasalahannya bukan bagaimana meningkatkan anggaran pendidikan, kesehatan dan sosial semata, tetapi bagaimana pemanfaatan dan pengalokasian anggaran ini digunakan dengan lebih baik dan lebih tepat sehingga peningkatan nilai IPM itu sendiri dapat terpenuhi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan yaitu, Belanja Pendidikan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan

terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan masih berfokus pada pembangunan fisik saja, sementara pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti guru dan siswa masih belum maksimal. Belanja Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan angka harapan hidup di Provinsi Aceh dan penurunan kematian bayi. Peningkatan tersebut juga disebabkan adanya perbaikan layanan kesehatan, baik dalam segi kuantitas dan kualitas di Kabupaten /Kota Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2011 – 2021.

Belanja Sosial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan program perlindungan sosial khususnya dalam mencapai target penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan di Kabupaten / Kota Provinsi Aceh. Variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Sosial secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota Provinsi Aceh. Namun, hanya 4 persen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen di atas. sedangkan sisanya yaitu 96 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi Tahun 2011-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun 2011-2021*. Aceh: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh Tahun 2011-2021*. Aceh: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Angka Harapan Hidup Provinsi Aceh Tahun 2011-2021*. Aceh: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Pendapatan Per Kapita Provinsi Aceh Tahun 2011-2021*. Aceh: Badan Pusat Statistik.
- DJPK. (2021). *Belanja Per Fungsi APBD Tahun 2011 – 2021*. Kementerian Keuangan.
- Rochaman dan sukma. (2019). *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Makroekonomi Terhadap Islamic*
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2011). *“Pembangunan Ekonomi”*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga